

ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sar
U



**UPAYA PENEGAKKAN DISIPLIN NASIONAL DALAM
KERANGKA NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA
INDONESIA (SUATU ANALISIS PSIKOSOSIAL)**

Oleh :

Dr. SARLITO WIRAWAN SARWONO

BHAKTI & HARMA WASPADA

Drs. HARRY SUSIANTO, MA.

PERPUSTAKAAN	
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN	
BUKU2	PEMBELIAN / SUMB / HADIAN
DARI	<i>Sumb. Dinas Polri</i>
TANGGAL TERIMA :	<i>17/12-91</i>
No INDUK :	<i>2.634/91</i>

SEMINAR POLRI 1991
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN
Jakarta, 25 s/d 27 April 1991

UPAYA PENEGAKKAN DISIPLIN NASIONAL

DALAM KERANGKA NILAI-NILAI

SOSIAL-BUDAYA INDONESIA

(suatu analisis Psikososial)*)

oleh: Dr Sarlito Wirawan Sarwono **) dan
Drs. Harry Susianto, MA ***)

Kiranya tidak ada orang yang bisa membantah bahwa faktor disiplin merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam keberhasilan seorang individu maupun suatu kelompok kesatuan (termasuk kelompok negara bangsa). Di pihak lain, juga tidak bisa diingkari bahwa disiplin nasional bangsa kita masih jauh di bawah yang diharapkan. Sementara itu ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang dihadapi bangsa Indonesia makin lama makin besar, walaupun sekaligus peluangnya juga bertambah baik. Menghadapi AGHT dan peluang itu, satu-satunya hal yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah bekerja sekuat tenaga dengan semangat dan disiplin setinggi-tingginya. Maka persoalan yang harus kita pecahkan sekarang adalah bagaimana caranya agar bangsa Indonesia dapat meningkatkan terus disiplin nasionalnya

*) Dibacakan dalam Seminar POLRI di Jakarta, 25-27 April 1991

**) Lektor Kepala/Ketua Jurusan Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi UI.

***) Aisisten Ahli/Staf Edukatif Jurusan Psikologi Sosial, Fakultas Psikologi UI.

dalam kondisi dan situasi sosial-budaya yang berlaku saat ini? Apakah mungkin disiplin nasional ditingkatkan tanpa merubah nilai-nilai sosial-budaya yang berlaku?

KENDALA NILAI-NILAI SOSIAL-BUDAYA.

Salah satu anggapan yang sudah menjadi pendapat umum adalah bahwa rendahnya disiplin nasional disebabkan oleh berlakunya nilai-nilai sosial-budaya tertentu seperti kebudayaan malu ("Shame culture") (Keeler, 1983: 152-163), budaya tradisional, "tepa salira", serasi-seimbang-selaras, "alon-alon waton kelakon", feodalisme dsb. Semua nilai ini mendorong orang untuk tidak menonjolkan diri, bersikap menunggu inisiatif dari orang lain, tidak mau menyinggung perasaan orang lain, tidak lugas dan akhirnya tidak mau berusaha sebaik-baiknya, tetapi jika ada kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri orang cenderung untuk memanfaatkannya tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Inilah yang dianggap menyebabkan orang jadinya tidak berdisiplin. Masalahnya, kalau bangsa Indonesia mau maju, mau lebih berdisiplin, apakah kita perlu menggeser nilai-nilai sosial-budaya kita tsb? Banyak orang yang cemas dengan pergeseran nilai ini, karena mereka melihat dampak negatifnya, yaitu berkembangnya sikap-sikap dan perilaku-perilaku tertentu yang tidak dikehendaki seperti keserba-bolehan seksual, individualisme, materialisme, sekulerisme dsb. Sebaliknya, mereka yang optimis menyatakan bahwa bangsa Jepang dan bangsa-bangsa dari negara-negara industri baru

seperti Singapura, Korea dan Taiwan bisa mencapai kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang dengan sangat mengesankan sementara mereka tetap bisa mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya.

GEJALA KETIDAK-DISIPLINAN NASIONAL

Dilemma di atas rasanya sudah perlu segera dipecahkan, oleh karena masalah disiplin nasional di negara kita nampaknya sudah sangat serius. Kita memang harus mengakui banyaknya hasil yang telah dicapai oleh program-program pembangunan kita, akan tetapi pada hal-hal yang sangat vital, justru masih terasa sekali berbagai kekurangan atau kelemahan. Salah satu kelemahan yang paling nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah kekurangan aparat-aparat pemerintah dalam koordinasi. Hal ini sudah disinyalir sejak awal jaman Orde Baru seperti pernah ditulis dalam Tajuk Rencana KOMPAS tanggal 29 Maret 1968:

Pengalaman selama satu setengah tahun menunjukkan bahwa kesimpangsiuran merupakan salah satu kelemahan dari pemerintah Pak Harto. Kebijakan sudah dirumuskan dalam peraturan dan instruksi. Sudah disalurkan pada aparat yang menurut fungsinya berkewajiban melaksanakannya. Ternyata mentah dalam pelaksanaan. Sudah barang tentu dengan berbagai alasan. Tetapi kenyataan itu betapapun ada alasannya tidak memeperbesar kewibawaan pemerintah dan merugikan efisiensi (Swantoro, 1990:29).

Yang menarik adalah bahwa lebih dari 20 tahun kemudian, tajuk rencana dari koran yang sama masih mengemukakan tentang kerisauan yang sama:

Kerisauan untuk memikirkan makna dan pelaksanaan pasal 33 kiranya juga dapat diartikan bahwa sesungguhnya kita belum merasa pas benar dengan perkembangan sejauh ini (Swantoro, 1990: 522).

Banyak contoh yang dapat dikemukakan tentang masih adanya kelemahan-kelemahan tsb. Misalnya, setiap instansi cenderung bekerja sendiri-sendiri, sehingga jalan-jalan raya tidak pernah berhenti digali dan dibongkar oleh perusahaan air minum, perusahaan listrik, telepon, dinas tata kota dsb. Sertifikat ganda untuk pemilikan tanah, adalah contoh lain yang menunjukkan masih kurangnya disiplin administrasi di kalangan instansi-instansi terkait.

Kecelakaan-kecelakaan yang mengambil korban banyak korban jiwa seperti kecelakaan bis di jalan tol, kecelakaan kapal laut (peristiwa Tampomas), kecelakaan kereta api, kecelakaan udara, hampir semuanya bersumber kepada kelalaian manusia yang tidak berdisiplin.

Gejala lainnya adalah dalam hal ketidak-mampuan perencanaan. PLN, misalnya, harus membatasi pemakaian listrik oleh industri pada jam-jam tertentu untuk mengurangi beban listrik, padahal

seharusnya PLN sudah bisa mengantisipasi kebutuhan industri jauh sebelumnya dan atas dasar itu mempersiapkan tenaga listrik yang diperlukan untuk dipasok kepada langganan.

Hal lain adalah lamban dan jeleknya pelayanan kepada masyarakat, tidak saja oleh instansi-instansi pemerintah, tetapi juga oleh beberapa perusahaan jasa swasta seperti asuransi (klaim yang dipersulit), bank (uang nasabah dibawa lari), perhotelan (hotel yang "overbooked" sehingga sejumlah wisatawan manca negara harus tidur di lobby) dsb. Dan tentu saja ketidak disiplin ini juga berpengaruh pada adanya pungli, ongkos ganda dsb., yang menyebabkan harga-harga jadi tinggi dan mengurangi daya saing komoditi dan jasa kita jika dibandingkan dengan luar negeri.

Memang berbagai upaya telah terus-menerus digalakkan. Antara lain dengan membudayakan Waskat (Pengawasan Melekat), meningkatkan fungsi badan-badan pengawas (Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, Kejaksaan, Kepolisian dsb.), akan tetapi fungsi pengawasan itu baru terbatas pada "law reinforcement" saja. Padahal "reinforcement" di dalam Psikologi hanya merupakan salah satu aspek saja yang menentukan tingkah laku yang sifatnya lebih merangsang tingkah laku dari luar. Teori Psikologi yang ditunjang oleh pengalaman di lapangan maupun eksperimen di laboratorium menyatakan bahwa tingkah laku yang dibangkitkan dengan "reinforcement" (tekanan dari luar) ini seara cepat atau lambat juga akan lenyap jika "reinforcement"-nya berkurang atau hilang.

Dengan perkataan lain, disiplin hanya bisa ditegakkan jika ada pengawas atau atasan. Tetapi begitu pengawas atau atasan itu pergi, disiplinpun rusak kembali. Demikianlah, karyawan hanya tekun kalau ada mandornya, lalu-lintas hanya tertib kalau ada Polisi lalu-lintas dsb. Masalahnya menjadi lebih rumit lagi jika si atasan atau pengawas itu sendiri juga tergolong tidak berdisiplin.

Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kita mencari jalan yang sebaik-baiknya untuk menegakkan disiplin nasional kita?

DEFINISI DISIPLIN.

Di Indonesia, disiplin nasional merupakan masalah yang cukup serius dan banyak dibicarakan dalam berbagai forum. Akan tetapi di literatur-literatur Psikologi Sosial di luar negeri tidak banyak ditemukan tulisan yang membahas masalah ini. Sepanjang pengetahuan penulis, literatur ilmu Politik dan Sosiologi juga tidak membahas masalah ini. Adapun masalah disiplin itu sendiri lebih merupakan porsinya ilmu pendidikan atau Psikologi Pendidikan karena disiplin dianggap sebagai proses pembentukan tingkah laku.

Walaupun demikian dalam kamus umum, disiplin didefinisikan sebagai:

1. Latihan (Training)

2. Efek dari training
3. Keadaan terlatih terhadap keteraturan dan ketaatan
4. Keteraturan di kalangan pelajar, tentara atau anggota kelompok
5. Sistem peraturan tertentu untuk bertingkah laku (rules of conduct)
6. Hukuman (misalnya: demi kebaikan anak itu perlu diajar disiplin).
7. Cabang dari ilmu/Pendidikan
8. Metode/aturan untuk anggota gereja
9. Kontrol terhadap anggota gereja
(Barnhart & Barnhart, 1982: 597).

Sedangkan sebuah kamus Psikologi mendefinsikan disiplin sbb.:

1. Cabang ilmu pengetahuan
2. Kontrol terhadap bawahan
3. Hukuman
4. Kontrol penguasaan diri dengan tujuan menahan impuls yang tidak diinginkan atau untuk mengecek kebiasaan
(Chaplin, 1989:139)

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan tujuan makalah ini, disiplin dapat didefinisikan sebagai:

Tingkah laku yang selalu taat kepada peraturan dan ketentuan.
Peraturan dan ketentuan itu bisa berupa yang berlaku dalam

masyarakat seperti hukum, norma sosial, norma agama, sopan-santun, dsb., maupun peraturan dan ketentuan yang dibuat sendiri seperti menepati janji, melakukan tugas rutin sehari-hari dengan konsisten dsb.

Ini berarti bahwa dalam Psikologi Sosial, disiplin menyangkut masalah penyesuaian diri sosial, khususnya konformitas terhadap norma-norma yang berlaku. Sulitnya, tidak semua tingkah laku yang tidak konform merupakan hal yang negatif bagi masyarakat. Menurut R.K. Merton (1959), misalnya, ada 4 cara adaptasi sosial yang non-konform di samping adaptasi sosial yang konform itu sendiri:

Modes of adaptation	Culture goals	Institutionalised means
Conformity	+	+
Innovation	+	-
Ritualism	-	+
Retreatism	-	-
Rebellion	±	±

(Sadli, 1977: 46)

Dari tabel di atas jelaslah bahwa tingkah laku inovasi tidak berdampak negatif pada tujuan masyarakat atau kebudayaan ybs. walaupun cara-cara yang dipakai tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Temuan-temuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya tidak akan terjadi jika orang tidak mau melepaskan diri

dari tata-cara atau kebiasaan yang berlaku. Sebaliknya konformitas yang berlebihan terhadap tata-cara yang berlaku bisa juga menimbulkan dampak negatif pada masyarakat dan kebudayaan seperti yang terjadi pada ritualism (misalnya fanatisme agama, birokrasi yang berlebihan, feodalisme dsb.). Hanya pada retreatism dilakukan hal-hal yang di luar kebiasaan yang tujuannya juga tidak sesuai dengan tujuan budaya atau masyarakat ybs. (misalnya: apatisme, ketidakpedulian). Sedangkan rebellion (pemberontakan) bisa menggunakan cara-cara yang lazim atau tidak lazim dalam masyarakat yang tujuannya bisa sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan masyarakat.

Oleh karena itu dalam mendefinisikan disiplin seyogyanya kita tidak hanya berpegang kepada norma atau tata cara yang lazim, melainkan juga memperhatikan tujuan dari tingkah laku disiplin itu sendiri. Jika tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat (cultural goal), maka masih dapat dikatakan tingkah laku itu berdisiplin walaupun caranya tidak sesuai dengan norma yang berlaku, tetapi jika tujuannya tidak sesuai dengan tujuan masyarakat atau merugikan masyarakat, maka tidak dapat dikatakan bahwa tingkah laku itu sebagai tingkah laku disiplin.

DISIPLIN SEBAGAI TINGKAH LAKU.

Pada akhirnya, masalah disiplin ini bisa dikembalikan kepada faktor tingkah laku dari manusia-manusia yang melaksanakan

pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Di dalam Psikologi, disiplin adalah masalah sikap, khususnya sikap terhadap tingkah laku. Bukan semata-mata masalah nilai, norma atau peraturan dan ketentuan.

Peraturan dan ketentuan dalam ABRI dan Pegawai Negeri, misalnya menetapkan bahwa perwira-perwira dan karyawan-karyawan yang telah membuktikan prestasinya yang terbaik di lapangan bisa meneruskan pendidikannya ke pendidikan yang lebih tinggi sampai tingkat SESKO dan SESPA. Mereka yang sudah lulus SESKO atau SESPA dianggap sebagai perwira-perwira dan pegawai-pegawai terbaik yang punya kemampuan untuk diberi kepercayaan memegang pos-pos pimpinan yang lebih tinggi bahkan tertinggi. Tidak mengherankan jika setiap perwira dan pegawai negeri bercita-cita masuk SESKO atau SESPA.

Tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memasuki jenjang-jenjang pendidikan ini bukan hanya kriteria prestasi yang obyektif yang harus dipenuhi, melainkan juga ada faktor-faktor lain seperti materialisme dan nepotisme dalam seleksi dan juga penempatannya setelah lulus yang menyebabkan seluruh sistem pendidikan dan karir tidak obyektif lagi. Bisa dibayangkan bagaimana akibat dari sistem yang tidak obyektif ini terhadap personil-personil pegawai atau perwira tinggi yang nantinya justru akan menjabat pimpinan yang harus menegakkan disiplin nasional.

Pada tingkat yang lebih rendahpun faktor yang menghambat timbulnya sikap disiplin terjadi. Juga sudah menjadi rahasia umum bahwa ada sementara oknum bagian personalia yang meminta sejumlah uang kepada calon-calon pegawai negeri maupun swasta atau calon-calon anggota ABRI. Sekali lagi, personil yang diterima bekerja melalui jalan yang melanggar semua norma disiplin ini tentunya tidak bisa diharapkan menjadi pegawai atau petugas yang disiplin pula. Jauh lebih besar kemungkinannya bahwa mereka justru akan menjadi orang-orang yang mengacaukan peraturan dan ketentuan yang berlaku hanya demi kepentingannya sendiri.

Dengan demikian, jika kita hendak menumbuhkan dan mengembangkan tingkah laku yang sesuai dengan tujuan negara, masyarakat dan bangsa maka kita perlu merenungkan tingkah laku manusia Indonesia. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu beberapa konsep dan teori mengenai tingkah laku.

SIKAP YANG MEMBENTUK TINGKAH LAKU.

Salah satu teori yang sangat banyak dianut oleh para pakar Psikologi saat ini adalah teori tentang sikap. Teori ini berpendapat bahwa tingkah laku ditentukan oleh sikap ("attitude"). L. Thurstone pada tahun 1946 mendefinisikan sikap sebagai berikut:

the intensity of positive or negative affect for or against a psychological object. A psychological object is any

symbol, person, phrase, slogan or idea, toward which people can differ as regards as positive or negative affect (Worchel & Cooper, 1979: 41).

Dalam sikap ini sedikitnya ada dua aspek ("domain"), yaitu aspek afektif (perasaan) dan aspek kognitif (pengetahuan). Gabungan dari aspek afektif dan aspek kognitif itu menimbulkan sikap yang positif (menyukai) atau negatif (tidak menyukai). Aspek afektif dapat diungkapkan dalam sebuah pernyataan afektif seperti: "Orang yang menyalah gunakan uang negara adalah koruptor" (dinamakan juga "value statement"), sedangkan aspek kognitif dapat diungkapkan dalam sebuah pernyataan kognitif seperti: "Rudy adalah Pimpinan Proyek yang menyalah gunalan uang negara" (dinamakan juga "belief"). Sikap yang timbul terhadap Rudy (value + belief) adalah: "Rudy adalah koruptor" (sikap negatif).

Tetapi sikap terhadap Rudy dalam contoh tsb. di atas bisa berbeda jika "value"-nya berbeda. Misalkan pernyataan afektifnya berbunyi sbb.: "Penyalah gunaan uang negara adalah suatu hal yang wajar karena hampir semua orang melakukannya", sedangkan pernyataan kognitifnya tetap yaitu: "Rudy adalah Pimpinan Proyek yang menyalah gunalan uang negara", maka sikap yang terjadi adalah (value + belief): "Rudy melakukan suatu hal yang wajar" (sikap positif).

Pada tahap berikutnya, sikap ini akan menentukan tingkah laku yang akan terjadi yaitu mendekati, menyetujui, menyukai, berusaha

memiliki dsb. (tingkah laku positif) atau menjauhi, menentang, ingin memberantas, jijik dsb. (tingkah laku negatif). Aspek tingkah laku dari sikap ini dinamakan juga domain Konatif.

TEORI-TEORI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN SIKAP.

Secara klasik ada dua pendapat mengenai pembentukan dan perubahan sikap ini. Pandangan yang pertama menekankan kepada faktor individu dan pandangan kedua menekankan kepada faktor lingkungan.

Yang menekankan kepada faktor individu antara lain adalah Slamet Iman Santoso. Ia mengemukakan pentingnya pendidikan dalam membentuk sikap. Dikatakannya bahwa tujuan tiap pendidikan yang murni adalah menyusun harga pribadi yang kukuh kuat dalam jiwa pelajar (Santoso, 1981: 33). Sedangkan pendidikan sekarang ini, menurut beliau, mempunyai ciri yang menunjukkan beberapa hal yang tidak wajar yaitu:

Belum mendalamnya pengertian tentang harga diri intrinsik kepribadian dan kepandaian watak, kehormatan diri dan moral. Segalanya itu hanya diukur dengan ada-tak adanya diploma (Santoso, 1981: 70).

Tokoh lain yang menitik beratkan faktor individu dalam perubahan sikap adalah White yang pada tahun 1961 meneliti tingkah laku manusia dan hewan dan berkesimpulan bahwa manusia dan hewan tidak hanya bertingkah laku reaktif (tergantung pada rangsang dari

lingkungan) melainkan juga bisa bertingkah laku proaktif. Yang dimaksud dengan dengan tingkah laku proaktif adalah tingkah laku yang "self directed". Tingkah laku ini mengabaikan "safety & security" untuk menghadapi tugas atau tantangan baru yang lebih sulit dan lebih berisiko (Schwitzgebel & Kolb, 1974: 160-161).

Seorang pakar lain bernama Julia B. Rotter menamakan kecenderungan untuk bertingkah laku proaktif itu dengan istilah Locus of Control (LOC) Internal. Menurut teori yang dikembangkan oleh Rotter dan seorang pakar lain bernama Levenson, ada dua tipe kepribadian manusia, yaitu yang ber-LOC Internal dan ber-LOC External. Tipe yang ber-LOC Internal dikatakan lebih percaya pada ketentuan-ketentuan yang sudah digariskannya sendiri dan lebih yakin bahwa ia bisa mengubah lingkungan sesuai dengan kemauannya sendiri, sedangkan yang ber-LOC External lebih tergantung kepada hal-hal di luar dirinya dan di luar kemampuannya untuk mengendalikannya (Lao, 1977: 112-113).

Di pihak lain M. Argyle mengemukakan bahwa yang penting adalah corak disiplin (dalam arti "training") yang diberikan kepada anak dalam proses sosialisasi anak. Disiplin yang terlalu ketat maupun yang terlalu longgar bisa menimbulkan tingkah laku delinkuen. Dengan perkataan lain, tingkah laku pelanggaran norma tergantung pada corak latihan yang diterima seseorang semasa dia kanak-kanak (Argyle, 1967: 63-64).

Tetapi Whiting yang juga mementingkan faktor lingkungan dalam

pembentukan dan perubahan sikap mengatakan bahwa faktor kebudayaanlah yang memegang peranan penting:

the culture will be an important part of what is consciously and intentionally transmitted to the child (Whiting, 1974: 155).

Dalam hal pengaruh kebudayaan ini menurut Whiting ada nilai-nilai budaya tertentu yang berpengaruh pada cara-cara orangtua mendidik anaknya. Jika cinta dan kehangatan merupakan nilai yang dominan dalam suatu masyarakat, maka nilai-nilai itu pulalah yang akan mewarnai pendidikan oleh orangtua terhadap anaknya. Akan tetapi pada dasarnya manusia itu menurut Whiting adalah makhluk yang berespons secara reaktif terhadap rangsang dari luar. Dalam hal ini rangsang yang berupa nilai-nilai budaya.

Suatu eksperimen yang membuktikan betapa orang cenderung berespons secara reaktif terhadap rangsang yang datang dari luar dilakukan oleh Milgram pada tahun 1965 dan 1974. Dalam eksperimennya Milgram menyuruh sejumlah responden untuk menjadi pemimpin percobaan (p.p.) dalam sebuah laboratorium. Tugas p.p. adalah memberikan kejutan listrik kepada orang percobaan (o.p.) jika o.p. gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh p.p. Makin banyak kesalahannya, makin besar tegangan listrik yang harus diberikan p.p. kepada o.p. dan o.p.pun makin menunjukkan reaksi kesakitan. Tetapi yang tidak diketahui oleh p.p. adalah bahwa sebenarnya tidak ada arus listrik sungguhan dan

o.p. hanya beraksi pura-pura kesakitan. O.p. disuruh bereaksi sesuai dengan jarum voltase yang bisa dilihat oleh o.p. Semula diperkirakan bahwa kebanyakan p.p. akan menghentikan eksperimen pada tingkat 130 V akan tetapi ternyata 63% dari responden yang menjadi p.p. melanjutkan eksperimen sampai 450 V. Ini membuktikan bahwa responden cenderung menuruti instruksi tanpa memikirkan konsekuensinya (Myers, 1988: 243). Yang menarik adalah bahwa kecenderungan menurut ini juga berbeda di antara kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Orang-orang Eropa yang menuruti perintah secara membabi buta seperti itu bisa mencapai 85%, sedangkan di Asia dan Amerika Selatan hanya berkisar antara 31-34% (Myers, 1988:266-267). Jelaslah bahwa responden Asia dan Amerika Latin lebih banyak mempertimbangkan kepentingan orang lain (o.p.) ketimbang responden Eropa dan Amerika Serikat.

Pertanyaan berikut yang timbul adalah: mengapa orang cenderung konform pada lingkungannya? Menurut H. Gerald (dalam Myers, 1988: 261) ada dua faktor penyebab yaitu pengaruh Normatif dan pengaruh Informasi. Sedangkan menurut Forsyth (1990: 160-167), selain kedua faktor itu masih ada satu faktor lagi yaitu pengaruh Interpersonal:

1. Pengaruh Normatif: Jika kita berada di sebuah restoran yang canggih, misalnya, maka dengan sendirinya kita akan menggunakan sendok, garpu dan pisau. Sedangkan kalau kita makan di warung maka tidak menjadi masalah kalau kita makan

dengan tangan. Begitu juga kalau seorang laki-laki tidak sengaja masuk ke WC wanita, begitu dia menyadari kesalahannya dia akan buru-buru keluar. Semua tingkah laku itu dikerjakan tanpa ada yang menyuruh atau mengharuskannya, tetapi rasanya memang lebih enak jika menuruti aturan dari pada tidak. Inilah yang dinamakan pengaruh normatif. Menurut S. Sadli, kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi dari norma sosial bagi kehidupannya. salah satu sebabnya adalah karena norma-norma menjadi bagian yang integral dan pribadi seseorang sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh ybs. (Sadli, 1977: 62).

2. Pengaruh informasi. Setiap orang ingin tahu posisi orang lain dulu sebelum ia sendiri menunjukkan reaksinya. Di dalam kelas misalnya, jika guru bertanya, murid saling menunggu reaksi murid-murid yang lain. Jika sudah ada yang berani menunjukkan jari, baru ia sendiri mau menunjukkan jari.
3. Pengaruh interpersonal. Dalam satu kelompok, jika ada yang bereaksi atau berpendapat lain dari yang lain, maka orang itu akan dianggap sebagai pengganggu hubungan interpersonal dalam kelompok.

HUBUNGAN SIKAP DAN TINGKAH LAKU DARI FISHBEIN DAN AJZEN.

Jika teori-teori di atas menekankan kepada faktor internal atau faktor external dalam pembentukan dan perubahan sikap teori berikut ini yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen mencoba

menerangkan hubungan sikap dan tingkah laku.

Untuk itu pertama-tama perlu diberikan pengertian tentang istilah "sikap" ("attitude") dan "tingkah laku" ("behaviour"). Selain itu juga akan diberikan pengertian-pengertian sentral lainnya dalam membicarakan hubungan sikap dan tingkah laku.

Sikap dalam teori Fishbein dan Ajzen diartikan sebagai besarnya perasaan positif atau negatif terhadap suatu obyek. Dalam hal ini pengertian mereka tentang sikap tidak menyimpang dari definisi dari Thurstone yang sudah dikutip di bagian yang lebih awal dari makalah ini:

Consistent with Thurstone's (1931) position, attitude may be conceptualized as the amount of affect for or against some object (Fishbein & Ajzen, 1975: 11).

Tetapi berbeda dari teori-teori sikap yang terdahulu (pre-Fishbein) obyek sikap pada teori Fishbein & Ajzen bukanlah hal-hal yang berada di luar diri individu (seperti benda, manusia, norma, dsb.), melainkan berupa tingkah laku dari individu itu sendiri. Dengan demikian, jika teori-teori pre-Fishbein berbicara tentang sikap terhadap "peraturan lalu-lintas", teori Fishbein & Ajzen berbicara tentang sikap terhadap "tingkah laku mematuhi peraturan lalu-lintas".

Perbedaan utama antara kedua pengertian tentang sikap itu terletak pada hubungan sikap dan tingkah laku. Pengertian sikap

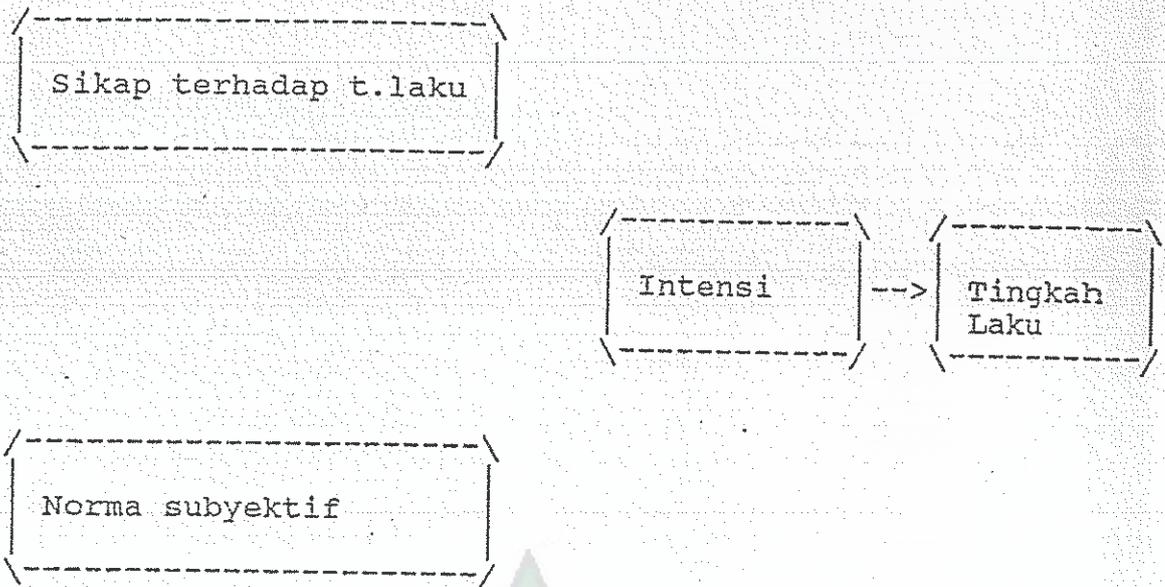
pada pre-Fishbein menganggap sikap sebagai "anteseden" (faktor penentu) langsung dari tingkah laku. Jadi, seseorang sudah bersikap positif terhadap peraturan lalu lintas, maka tingkah lakunya sudah barang tentu akan mentaati peraturan lalu-lintas itu. Demikian pula sebaliknya. Akan tetapi kenyataannya tingkah laku yang terjadi tidak selalu konsisten dengan sikap. Ada orang-orang yang bersikap positif terhadap aturan tetapi tetap melanggar, sedangkan adakalanya orang bersikap negatif pada aturan tetapi justru mentaati aturan itu (misalnya jika ada polisi). Oleh karena itu dalam pengertian Fishbein & Ajzen, pengetahuan tentang sikap individu belum dianggap sebagai faktor yang memungkinkan prediksi terhadap suatu tingkah laku.

Adapun tingkah laku itu sendiri, dalam teori Fishbein & Ajzen dibatasi pada tindakan yang dapat diamati. Jadi kalau hendak diteliti tingkah laku "mematuhi peraturan lalu lintas", harus dirumuskan terlebih dahulu dengan jelas tingkah laku macam apa yang dimaksud dalam pengertian ini. Misalnya: berhenti di lampu merah, tidak melanggar rambu-rambu, memberi prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari arah tertentu dsb. Yang penting tingkah laku yang dirumuskan tsb. harus berupa tindakan nyata yang dapat diamati.

Dua istilah lain yang juga merupakan pengertian sentral dalam hubungan antara sikap dan tingkah laku adalah "norma subyektif" dan "intensi" (niat). Norma subyektif adalah persepsi individu

tentang pendapat orang-orang terdekatnya mengenai suatu tingkah laku tertentu. Misalnya bagaimana menurut individu itu pendapat bapaknya, sahabatnya, isterinya, teman-teman sekantornya dsb. tentang tingkah laku mematuhi peraturan lalu-lintas tsb. Orang-orang terdekat yang berkaitan dengan tingkah laku yang sedang diteliti tsb. dinamakan "significant others" (orang-orang lain yang bermakna).

Dalam hubungan sikap dan tingkah laku, maka intensi-lah yang berperan penting dalam tercetusnya tingkah laku. Seperti telah dikemukakan di atas, dalam teori ini terjadi atau tidak terjadinya tingkah laku tidak diramalkan dari sikap melainkan ditentukan oleh intensi. Intensi merupakan besarnya keyakinan individu bahwa ia akan melakukan suatu tingkah laku tertentu. dengan demikian intensi untuk mematuhi peraturan lalu-lintas adalah seberapa besarnya niat individu itu untuk sungguh-sungguh mematuhi peraturan lalu-lintas dalam keadaan yang sesungguhnya. Tetapi dalam teori ini dikemukakan pula bahwa intensi itu sendiri, walaupun merupakan faktor terpenting yang mencetuskan tingkah laku, ia tidak berdiri sendiri. Intensi dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif sebagaimana tampak dalam skema berikut:



Skema 1. Hubungan antara sikap dan tingkah laku (Ajzen, 1988:118)

Idealnya untuk setiap tingkah laku diperoleh bobot sikap dan norma subyektifnya. Kedua bobot tsb dapat dipandang sebagai mencerminkan pentingnya faktor personal (sikap) dan sosial (norma subyektif) dalam menentukan intensi melakukan suatu tingkah laku. Dari studi-studi yang menggunakan model Fishbein & Ajzen bobot sikap dan norma subyektif bervariasi menurut jenis tingkah laku yang diteliti. Mungkin untuk tingkah laku sejenis hobi, ketekunan belajar dsb., faktor sikap lebih besar bobotnya. Sedangkan untuk jenis tingkah laku seperti ketaatan pada tata krama, membeli baju dengan model tertentu dsb. bobot dari faktor norma subyektiflah yang lebih besar. Tetapi adakalanya juga bobot dari kedua faktor itu sama besarnya.

Selanjutnya, berbicara tentang faktor sikap itu sendiri, Fishbein & Ajzen mengatakan bahwa konsep yang terpenting dalam sikap adalah "keyakinan ("belief") terhadap konsekuensi dari tingkah laku" dan "evaluasi terhadap konsekuensi tsb.". Misalnya, dalam tingkah laku mematuhi peraturan lalu lintas tsb. di atas. Menurut Fishbein & Ajzen, di antara sekian banyak keyakinan individu tentang tingkahlaku tsb., hanya ada beberapa yang menonjol ("salient beliefs"). Katakanlah keyakinan yang menonjol dari konsekuensi dari tingkah laku patuh pada aturan lalu lintas itu ada tiga yaitu: lalu lintas lancar, tidak kena tilang dan harus sabar.

Maka langkah yang selanjutnya untuk mengukur sikap terhadap tingkah laku mematuhi aturan lalu lintas itu adalah menanyakan kepada orang ybs. bagaimana evaluasi dia tentang ke-tiga keyakinan yang menonjol itu. Apakah lalu lintas lancar dinilainya negatif atau positif? Tidak kena tilang dinilai negatif atau positif? dan harus sabar dinilai negatif atau positif? Dengan menjumlahkan hasil kali besarnya keyakinan dengan evaluasinya untuk ketiga keyakinan itu, maka diperoleh nilai sikap.

Sedangkan untuk norma subyektif, konsep yang sentral adalah keyakinan normatif ("normative belief") yaitu keyakinan bahwa kelompok atau individu tertentu yang terkait ("significant others") berpikir, bahwa ia harus atau tidak boleh melakukan tingkah laku tertentu. Jadi seberapa jauh ia yakin bahwa kelompok

(teman-teman) atau orang lain (orangtua, isteri, polisi) mengharuskan atau melarangnya untuk mematuhi peraturan lalu-lintas. Di samping itu, konsep kedua dalam faktor norma subyektif ini adalah motivasi untuk mengikuti keharusan atau larangan dari kelompok atau orang lain itu. Dalam contoh di atas, mungkin orang akan lebih mematuhi kehendak teman dan isteri dari pada orangtua dan polisi. Besarnya norma subyektif diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian dari keyakinan normatif dan motivasi untuk semua "significant others" itu.

Dengan melihat skema 1 lagi, jelaslah bahwa teori Fishbein & Ajzen merupakan gabungan dari teori-teori yang lebih menekankan faktor internal (sikap) dan teori-teori yang lebih menekankan faktor external (norma sosial) dalam pembentukan dan perubahan tingkah laku ini. Menurut Fishbein & Ajzen, tingkah laku hanya dapat dirubah melalui perubahan intensi. Karena intensi merupakan fungsi dari sikap dan norma subyektif, maka perubahan intensi harus melalui salah satu atau kedua faktor ini.

Sehubungan dengan ini, bobot masing-masing faktor terhadap intensi menjadi sangat penting. Perubahan pada faktor yang bobotnya lebih besar, akan memberi sumbangan yang lebih berarti pada perubahan intensi. Dengan perkataan lain, jika sudah diidentifikasi bahwa faktor norma subyektif mempunyai bobot lebih besar pada intensi, maka faktor itulah yang perlu direkayasa. Sebaliknya kalau faktor sikap yang diidentifikasi sebagai

mempunyai bobot yang lebih besar, faktor inilah yang perlu dirubah.

Menurut Fishbein & Ajzen, ada dua teknik untuk mengubah sikap atau norma subyektif, yaitu mengamati sendiri bahwa suatu tingkah laku mempunyai konsekuensi tertentu atau ia memperoleh informasi bahwa suatu perilaku memiliki konsekuensi tertentu.

BEBERAPA CONTOH TINGKAH LAKU DISIPLIN.

Sebagai ilustrasi dari penerapan teori Fishbein & Ajzen tsb. di atas dalam peningkatan disiplin nasional, berikut ini akan disampaikan beberapa contoh yang diambil dari kehidupan sehari-hari.

Masalah kebersihan.

Masalah kebersihan adalah salah satu kendala yang sulit sekali dipecahkan terutama di kota-kota besar. Seharusnya kebersihan kota akan lebih mudah tercapai jika tiap-tiap warga bisa bertingkah laku menjaga kebersihan. Misalnya: tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi mengapa banyak warga, termasuk yang berpendidikan tinggi sekalipun yang masih juga membuang sampah sembarangan? Yang jelas intensinya untuk membuang sampah di tempatnya tidak ada.

Agar intensi warga untuk membuang sampah secara benar ini

meningkat, kita harus ketahui terlebih dahulu sikap dan norma subyektifnya. Kepercayaan apa yang menonjol sebagai akibat dari membuang sampah secara benar? Kemungkinannya adalah: harus mencari tempat pembuangan sampah yang benar, capek, repot, nyusahin diri dsb. Dan semua keyakinan itui kalau dinilai akan mendapat skornegatif, sehingga sikap yang timbul terhadap tingkah laku membuang sampah yang benarpun jadi negatif. Dalam hal ini sangat kecil kemungkinannya bahwa kelompok atau orang-orang yang terkait melarang individu ybs. untuk bertingkah laku membuang sampah yang benar. Orangtua, teman, isteri, pejabat pemerintah, petugas dinas kebersihan, semuanya tentu menghendaki agar setiap warga membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian norma subyektif yang ada adalah positif.

Jika sudah diketahui bahwa faktor penyebabnya adalah pada sikap, maka yang perlu direkayasa adalah faktor sikap tsb. Mengapa timbul keyakinan yang negatif tsb. di atas? Karena faktor pengalaman. Maka perlu diusahakan agar warga mempunyai pengalaman yang positif sebagai konsekuensi membuang sampah pada tempatnya (sebaliknya akan mendapat pengalaman negatif kalau membuang sampah sembarangan). Maka pemerintah daerah, misalnya perlu mengupayakan program kebersihan kota yang besar-besaran dan terus-menerus. Termasuk penindakan terhadap pelanggar-pelanggarnya. Jika warga sudah menyaksikan sendiri bahwa konsekuensi dari tingkah laku membuang sampah di tempatnya adalah positif, maka dengan sendirinya akan terbentuk sikap yang positif

yang pada gilirannya akan merubah intensi juga menjadi positif.

Korupsi.

Jika dalam masalah sampah tsb. di atas telah berkembang sikap negatif terhadap tingkah laku yang seharusnya diberi sikap positif, dalam masalah korupsi yang terjadi justru sebaliknya. Tingkah laku yang seharusnya diberi sikap negatif malah diberi sikap positif. Dari faktor norma subyektif kiranya sudah jelas bahwa tingkah laku korupsi tidak dikehendaki oleh hampir setiap kelompok atau orang lain yang terkait. Demikian juga pada hakikatnya setiap orang mempunyai motivasi yang besar untuk mentaati kehendak kelompok dan orang-orang itu untuk tidak korupsi. Tetapi dalam kenyataannya kepercayaan yang timbul sebagai konsekuensi tingkah laku korupsi justru positif, seperti cepat menjadi kaya, tidak ada hukuman yang berat, semua orang juga melakukannya, bahkan atasannya sendiripun ikut melakukannya dsb. Tidak mengherankan bahwa intensi untuk tidak korupsi tidak juga terjadi walaupun norma subyektifnya menyatakan demikian. Dalam hal ini, seperti juga halnya dengan masalah kebersihan tsb. di atas, yang diperlukan adalah memberikan bukti-bukti nyata bahwa korupsi memang menimbulkan konsekuensi negatif pada pelakunya. dengan perkataan lain, program pemberantasan korupsi yang tegas tanpa pandang bulu harus dilaksanakan terus-menerus, sedangkan slogan-slogan dan himbauan-himbauan tidak ada

manfaatnya lagi untuk diteruskan.

SARA.

Tingkah laku rasialis atau prasangka antar agama, kesukuan atau antar golongan ditimbulkan bukan oleh faktor sikap, melainkan oleh faktor norma subyektif. Dari segi sikap boleh dikatakan bahwa keyakinan yang timbul tentang konsekuensi perbuatan non-SARA terhadap golongan lain adalah hal-hal yang bisa dinilai netral atau bahkan positif. Misalnya: persahabatan, hubungan baik, keakraban, saling kepercayaan dsb. Pokoknya segala konsekuensi yang dapat ditimbulkan dari hubungan yang tak berprasangka terhadap setiap kelompok lainnya akan terjadi juga pada hubungan dengan kelompok yang diprasangkai itu. Akan tetapi faktor norma subyektif dalam hal ini kiranya lebih kuat peranannya. Jika kakek, nenek, orangtua, teman-teman sekampung, teman-teman sekantor, bahkan para pemimpin, tokoh, pejabat dan ulama sekalipun semuanya berbicara tentang keharusan orang bertingkah laku SARA terhadap golongan lain, maka mudah diperkirakan bahwa norma subyektifpun menjadi cenderung kepada tingkah laku anti golongan lain itu. Karena bobot norma subyektif ini ternyata lebih besar, maka usaha untuk merubah intensi masyarakat tidak bisa lagi melalui perubahan sikap (dengan memberi bukti-bukti nyata), melainkan harus melalui komunikasi yang persuasif dan massal agar sebanyak mungkin anggota masyarakat berbicara tentang tingkah laku non-rasial dan sebanyak

mungkin mencegah tingkah laku rasial. Di sinilah diperlukan peran tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin dan ulama sebagai tokoh panutan.

Keluarga Berencana.

Penggunaan tokoh panutan untuk membentuk norma subyektif telah dengan sangat berhasil dilakukan dalam keluarga berencana di Indoneisa. Dalam waktu 15 tahun pemerintah telah berhasil mengajak para ulama, apemimpin, pendidik, para ahli kesehatan dsb. untuk mendukung program KB walaupun pada awalnya ada penolakan yang cukup besar. Sementara itu kepada masyarakat juga secara bertahap dibuktikan dengan sangat nyata manfaat-manfaat dari KB baik bagi diri pribadi, keluarga maupun masyarakat dan bangsa. Dengan demikian lambat laun terbentuklah sikap yang positif terhadap KB, sehingga saat ini intensi masyarakat untuk ber-KB boleh dikatakan sangat tinggi. Jumlah akseptor meningkat terus tiap tahun dan angka kenaikan jumlah penduduk per tahun dapat ditekan dengan sangat baik. Di sini nampak adanya program yang menggunakan jalur pembuktian langsung untuk mempengaruhi sikap dan jalur komunikasi persuasif untuk mempengaruhi norma subyektif yang pada gilirannya berhasil mengubah intensi masyarakat dari anti-KB menjadi pro-KB.

KESIMPULAN.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam literatur luar negeri masalah Disiplin nasional bukanlah hal yang banyak dipersoalkan. Yang lebih banyak dibahas adalah hal-hal seperti norma sosial, konformitas sosial, proses sosialisasi, dsb. Walaupun demikian, untuk Indonesia, Disiplin nasional masih merupakan masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus.
2. Agar efektif dan efisien, penanganan masalah disiplin ini tidak bisa lagi hanya dilaksanakan dengan cara-cara yang sangat umum, seperti melalui anjuran, himbauan, doktrin-doktrin, penataran-penataran dan contoh-contoh dari tokoh masyarakat saja. Sebaliknya dalam menegakkan disiplin perlu dianut anggapan bahwa disiplin tidak lain adalah tingkah laku dan sebagaimana halnya dengan setiap tingkah laku yang lain, untuk mempengaruhi atau meningkatkan disiplin sangat perlu dipelajari disiplin apa yang hendak kita tingkatkan itu dan dalam konteks apa. Dengan perkataan lain, kita harus mempelajari dan selanjutnya mengintervensi tingkah laku disiplin kasus demi kasus.
3. Sebagai tingkah laku, disiplin dipengaruhi oleh intensi. Sedangkan yang berpengaruh pada intensi itu adalah faktor sikap (faktor personal) dan faktor norma subyektif (faktor sosial).
4. Kita tidak dapat lagi berpegang kepada salah satu teori saja, baik teori faktor internal maupun teori faktor external,

melainkan harus mempertimbangkan kedua faktor itu. Kedua faktor itu saling berkaitan dalam faktor personal maupun faktor sosial di atas. Kita perlu membuat program yang disesuaikan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai mempunyai bobot yang lebih besar.

5. Dalam sejarah Orde Baru telah terbukti bahwa bangsa Indonesia mampu menegakkan disiplin nasional dalam bidang KB melalui upaya pembentukan sikap dan norma subyektif yang konsisten dan berkesinambungan selama 15 tahun. Dalam sektor-sektor lain hal ini masih perlu diusahakan. Dalam sektor lalu-lintas dan kebersihan, misalnya, yang perlu diusahakan adalah terbentuknya sikap yang positif terhadap tingkah laku mematuhi peraturan, melalui pembuktian-pembuktian empirik bahwa tingkah laku tsb. memang memberikan dampak positif. Dalam bidang pemberantasan korupsi, yang perlu diusahakan adalah memberikan bukti kongkrit bahwa akibat dari tingkah laku korupsi adalah negatif, sehingga sikap yang akan ditumbuhkan terhadap tingkah laku korupsi itupun negatif. Dalam ketiga kasus ini, norma subyektif atau norma sosial tidak perlu dipermasalahkan lagi karena yang ada sudah cukup sesuai dengan tujuan pembangunan. Sebaliknya, untuk masalah seperti SARA, yang diperlukan justru penumbuhan norma subyektif agar bersama dengan sikap yang sudah positif, dapat dikembangkan intensi untuk bertingkah laku non-SARA.

DAFTAR PUSTAKA.

- Argyle, M. 1967: Psychology and Social Problems, Methuen & Co. Ltd., London
- Barnhart, C.L. & Barnhart, R.K. 1982: The World Book Dictionary, World Book-Childcraft Int., Inc. Chicago
- Chaplin, C.P. 1989: Kamus Lengkap Psikologi, penterjemah: Kartini Kartono, Rajawali, Jakarta
- Fishbein & Ajzen 1975: Belief, Attitude, Intention & Behavior: An introduction to theory and research, Addison & Wseley, Reading, Mass.
- Forsyth, D.R. 1990: Group dynamics, Brooks/Cole Publ. Co, Pacific Grove, Calif.
- Keeler, W. 1983: "Shame and Strage fright in Java", Ethos, Society for Psychological Anthropology, 11:3
- Lao, R.C. 1977: "Levenson's IEC (Internal External Control) Scale", Journal of Cross Cultural Psychology", 9:1
- Myers, D.G. 1988: Social Psychology, Mc Graw Hill, N.Y.
- Sadli, S. 1977: Persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang, Bulan Bintang, Jakarta
- Santoso, Slamet I., 1981: Pembinaan watak, tugas utama Pendidikan, UI Press, Jakarta.
- Scwitzgebel, R.K. & Kolb, D.A. 1974: Changing Human Behavior, Mc Graw Hill, Tokyo
- Swantoro, P. 1990: Membuka Cakrawala: 25 tahun Indonesia dan Dunia dalam Tajuk KOMPAS, Gramedia, Jakarta
- Whiting, J.W.M. et al. 1974: "The Learning of values", Culture and Personality: contemporary readings, La Vine (ed.), Aldine Publ. Co., N.Y.
- Worchel, S. & Cooper, J. 1979: Understanding Social Psychology, The Dorsey Press, Homewood, Ill.